

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat kami selesaikan. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sepanjang tahun 2025. Hal ini mencerminkan komitmen kami terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP Tahun 2025 ini memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, serta capaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, yaitu: **Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di Masyarakat**, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak, baik dari masyarakat, dunia usaha, maupun jajaran pemerintah daerah, dalam perumusan kebijakan, implementasi, serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Purwokerto, 30 Maret 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS



Eko Heru Surono, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670425 198903 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas terhadap suatu perencanaan strategis organisasi yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran indikator yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan standar kualitas pelayanan. Pada tahun 2025, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator kinerja telah menunjukkan hasil yang cukup beragam dalam mewujudkan tujuan, serta dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Berikut ini adalah rincian capaian kinerja beserta predikat kinerjanya.

Pada Tahun 2025, terdapat tiga indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Standar deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam
Indikator ini mengukur seberapa stabil, aman, harmonis, dan tangguh kondisi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Dengan capaian kinerja sebesar -41,5%, indikator ini mendapatkan predikat Tidak Tercapai, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum berhasil dipenuhi.
2. Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik
Indikator ini mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas berhasil mencapai 1.266,67% dari target yang ditetapkan, sehingga memperoleh predikat Tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan berjalan kurang optimal, khususnya dalam penentuan target sehingga capaian jauh

di atas 100%.

3. Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan potensi konflik Ipoleksosbudhankam di Kabupaten Banyumas. Dengan capaian 100%, indikator ini mendapatkan predikat Tercapai, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah konflik Ipoleksosbudhankam di Kabupaten Banyumas, pemerintah telah berhasil menangani seluruhnya.

Secara keseluruhan, dari tiga indikator kinerja utama (IKU) yang dievaluasi, dua indikator berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, sementara satu indikator masih memerlukan perbaikan untuk dapat memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas secara umum berjalan dengan baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjaga kondusivitas di Kabupaten Banyumas.

Pada Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp15.144.419.993,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi mencakup pengeluaran rutin yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta pemeliharaan aset. Pada periode ini, anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Operasi adalah Rp15.068.643.993,00 dengan realisasi sebesar Rp14.612.927.071,00 atau 96,98% dari target anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi dana telah digunakan sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan aset tetap, seperti infrastruktur, peralatan, dan investasi lainnya yang berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik. Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal adalah Rp75.776.000,00, dengan

realisasi mencapai Rp74.335.280,00 atau 98,10% dari anggaran yang telah ditetapkan. Persentase realisasi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar investasi telah berhasil direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Analisis Capaian Realisasi

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas tahun 2025 tergolong tinggi dengan persentase 96,98%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja, terutama pada Belanja Operasi dengan deviasi sekitar 3%, serta pada Belanja Modal sebesar 1,9%. Penyebab perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti efisiensi penggunaan anggaran, perubahan kebutuhan belanja, serta kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, dengan capaian kinerja rata-rata 475% tingkat penyerapan anggaran di atas 96%. Dengan sisa anggaran yang belum terserap, angka ini menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ke depan, evaluasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran serta memastikan optimalisasi penggunaan dana dalam setiap program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	2
D. SUMBER DAYA APARATUR	4
E. ISU STRATEGIS	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	9
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
E. PRESTASI dan PENGHARGAAN	47
BAB IV PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD atau OPD pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah ditunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas tetap merupakan OPD Kabupaten Banyumas dibawah Bupati Banyumas, sampai dengan peraturan tersebut diatas diundangkan.

Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas berpayung pada Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 dan Perda Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan tupoksi, dengan mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas hanya melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati,

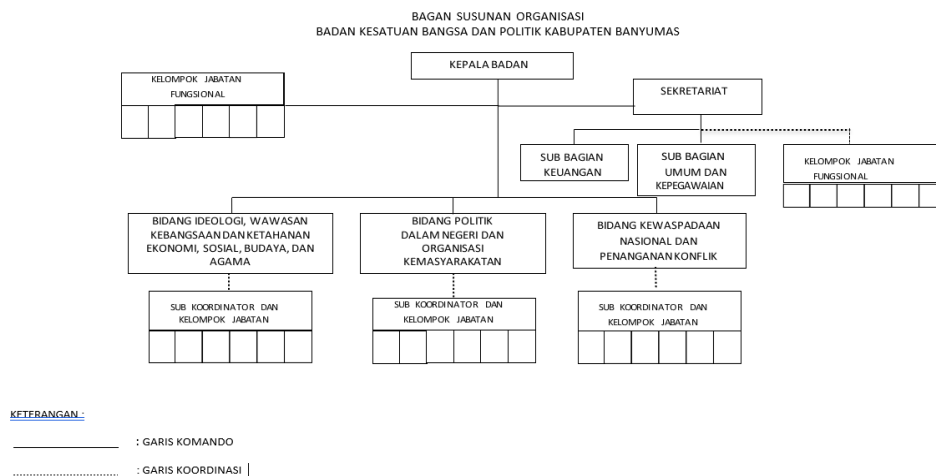
melaksanakan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Badan Kesatuan Bangsa dan politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan / atau penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan / atau penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan / atau penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

C. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021

D. SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibutuhkan personil dan peralatan yang memadai. Kondisi sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. ASN Berdasarkan Golongan

Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sampai dengan akhir Tahun 2025 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
ASN Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. PNS				
1. Golongan I	-	-	-	-
2. Golongan II	1	1	2	7,14
3. Golongan III	12	6	18	64,30
4. Golongan IV	3	-	3	10,71
B. PPPK				
1. Golongan VII	1	1	2	7,14
2. Golongan IX	1	2	3	10,71
Jumlah	18	10	28	100

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Tahun 2025

2. ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sampai dengan akhir Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-
SMA	2	-	2	7,14
D-I	-	-	-	-
D-II	-	-	-	-
D-III	1	2	3	10,71
S-1	14	8	22	78,57
S-2	1	-	1	3,58
S-3	-	-	-	-
Jumlah	18	10	28	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama atau tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi, daerah, atau negara. Isu ini bersifat mendasar, berjangka panjang, dan memerlukan perhatian serta tindakan strategis untuk diselesaikan. Isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **“Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat”**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Banyumas

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Berdasarkan kondisi dan analisis potensi daerah Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyumas 2025 adalah : BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU dan BERDAYA SAING, SERTA LESTARI

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi dengan penjelasan sebagai berikut

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera
Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).
- b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.
- c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing

Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperanserta secara aktif di dunia internasional.

d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

2. Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Banyumas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
- b. dan/atau penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan/atau

- penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan/atau penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dari tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung misi Pemkab yaitu Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari yaitu dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas No. 000.7.2.7/82/ Tahun 2025, IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di Masyarakat	standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	6	Formulasi : Standar deviasi diperoleh dengan (akar kuadrat dari jumlah (angka konflik - rata rata) dikuadratkan dibagi jumlah data) Tipe perhitungan : progres negatif Sumber data : Data Konflik 2025 dari Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik Bakesbangpol
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	0,015	Formulasi : (Jumlah orang yang mendapat pendidikan politik / jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT)*100% Tipe perhitungan : Akumulatif Sumber data : Laporan Kegiatan Pendidikan Politik Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol
3	Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam	100%	Formulasi : (angka potensi konflik-angka konflik)/angka potensi konflik*100% Tipe perhitungan : Progres positif Sumber data : Data Konflik tahun 2025 dari Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik Bakesbangpol

Sumber: Lampiran IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diambil dari Indikator Tujuan dari Renstra Strategis Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024- 2026. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 terdiri dari satu Tujuan, yaitu Meningkatkan kondusivitas Ipoleksosbudhankam di Masyarakat dengan 1 (satu) indikator; serta dua Sasaran, yaitu: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik dengan 1 (satu) indikator; dan

Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat dengan 1 (satu) indikator. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 meliputi Standar Deviasi Konflik Ipoleksosbudhankam, Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik, dan Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator	Target	Keterangan
1	Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di Masyarakat	standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	6	Formulasi : Standar deviasi diperoleh dengan (akar kuadrat dari jumlah (angka konflik - rata rata) dikuadratkan dibagi jumlah data) Tipe perhitungan : progres negatif Sumber data : Data Konflik 2025 dari Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik Bakesbangpol
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	0,015	Formulasi : (Jumlah orang yang mendapat pendidikan politik / jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT)*100% Tipe perhitungan : Akumulatif Sumber data : Laporan Kegiatan Pendidikan Politik Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol

3	Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik lpoleksosbudhank am	100%	Formulasi : $(\text{angka potensi konflik}-\text{angka konflik})/\text{angka potensi konflik} \times 100\%$ Tipe perhitungan : Progres positif Sumber data : Data Konflik tahun 2025 dari Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik Bakesbangpol
---	---	---	------	---

Sumber: Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp15.144.419.993,00 (Lima belas milyar seratus empat puluh empat juga empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan komposisi anggaran belanja operasi sebesar Rp Rp15.068.643.993,00 (Lima belas milyar enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan anggaran belanja modal sebesar Rp75.776.000,00 (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Berikut ini adalah rincian Rencana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukung terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dari bulan Januari s.d Desember.

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5,285,077,193	5,285,077,192	414,978,340	821,337,901	1,250,852,662	1,657,566,593	2,076,479,854	2,700,245,313	3,079,548,574	3,462,851,835	3,921,904,196	4,395,089,491	4,888,496,398	5,285,077,192
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131,049,600	131,049,600	0	3,430,000	4,180,000	9,380,000	19,835,000	20,585,000	20,585,000	20,585,000	31,379,100	54,924,100	127,299,600	131,049,600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,349,600	32,349,600	0	250	1,000,000	1,000,000	5,350,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	16,894,100	19,294,100	32,349,600	32,349,600
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0,77	3,09	3,09	16,54	18,86	18,86	18,86	51,63	59,05	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98,700,000	98,700,000	0	3,180,000	3,180,000	8,380,000	14,485,000	14,485,000	14,485,000	14,485,000	14,485,000	35,630,000	94,950,000	98,700,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	3,24	3,24	9,94	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	37,68	96,24	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,971,607,316	3,971,607,315	324,312,070	648,624,140	987,831,210	1,312,143,280	1,636,455,350	1,975,662,420	2,299,974,490	2,624,286,560	2,967,941,630	3,297,502,164	3,627,963,996	3,971,607,315
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	3,912,027,316	3,912,027,315	324,312,070	648,624,140	972,936,210	1,297,248,280	1,621,560,350	1,945,872,420	2,270,184,490	2,594,496,560	2,923,256,630	3,252,817,164	3,583,278,996	3,912,027,315
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			8,29	16,57	24,86	33,15	41,43	49,72	58,01	66,29	74,7	83,12	91,56	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59,580,000	59,580,000	0	0	14,895,000	14,895,000	14,895,000	29,790,000	29,790,000	29,790,000	44,685,000	44,685,000	44,685,000	59,580,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	453,582,464	453,582,464	44,380,079	69,682,879	111,975,879	140,413,049	148,639,549	272,570,746	280,797,246	291,023,746	310,115,746	378,851,746	420,601,964	453,582,464
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	13,176,300	13,176,300	0	3,176,300	3,176,300	3,176,300	3,176,300	8,176,300	8,176,300	8,176,300	8,176,300	13,176,300	13,176,300	13,176,300

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	24,11	24,11	24,11	24,11	62,06	62,06	62,06	62,06	100	100	100
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	84,502,728	84,502,728	0	13,900,000	18,621,000	34,871,000	34,871,000	67,181,610	67,181,610	69,181,610	80,047,110	80,047,110	84,502,728	84,502,728
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	16,45	22,04	41,27	41,27	79,5	79,5	81,87	94,73	94,73	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,226,170	7,226,170	0	0	3,265,500	7,226,170	7,226,170	7,226,170	7,226,170	7,226,170	7,226,170	7,226,170	7,226,170	7,226,170
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	45,19	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139,125,000	139,125,000	9,068,500	14,295,000	24,871,500	30,098,000	35,324,500	80,831,000	86,057,500	91,284,000	96,510,500	108,372,000	121,144,500	139,125,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			6,51	10,27	17,87	21,63	25,38	58,09	61,85	65,61	69,37	77,89	87,08	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,774,587	22,774,587	0	0	0	0	0	18,114,087	18,114,087	18,114,087	18,114,087	18,114,087	22,774,587	22,774,587
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	0	0	0	79,54	79,54	79,54	79,54	79,54	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	186,047,400	186,047,400	35,311,300	38,311,300	61,311,300	64,311,300	67,311,300	90,311,300	93,311,300	96,311,300	99,311,300	151,185,800	171,047,400	186,047,400
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			18,97	20,58	32,94	34,56	36,17	48,53	50,15	51,76	53,37	81,26	91,94	100
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	730,279	730,279	279	279	730,279	730,279	730,279	730,279	730,279	730,279	730,279	730,279	730,279	730,279
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0,04	0,04	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29,655,000	29,655,000	0	0	500	500	29,655,000	29,655,000	29,655,000	29,655,000	29,655,000	29,655,000	29,655,000	29,655,000
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	500	500	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	29,155,000	29,155,000	0	0	0	0	29,155,000	29,155,000	29,155,000	29,155,000	29,155,000	29,155,000	29,155,000	29,155,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517,125,813	517,125,813	46,136,191	92,750,882	139,365,573	185,980,264	232,594,955	279,209,646	325,824,337	372,439,028	419,053,719	461,437,480	501,068,838	517,125,813
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	99,527,512	99,527,512	8,136,333	16,751,166	25,365,999	33,980,832	42,595,665	51,210,498	59,825,331	68,440,164	77,054,997	85,638,900	93,770,400	99,527,512
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			8,17	16,82	25,48	34,13	42,78	51,43	60,08	68,74	77,39	86,01	94,18	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417,598,301	417,598,301	37,999,858	75,999,716	113,999,574	151,999,432	189,999,290	227,999,148	265,999,006	303,998,864	341,998,722	375,798,580	407,298,438	417,598,301
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			9,1	18,19	27,29	36,39	45,48	54,58	63,68	72,78	81,87	89,97	97,52	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182,057,000	182,057,000	150	6,850,000	7,000,000	9,150,000	9,300,000	122,562,501	122,712,501	124,862,501	163,759,001	172,719,001	181,907,000	182,057,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	87,550,000	87,550,000	0	6,550,000	6,550,000	8,550,000	8,550,000	50,862,501	50,862,501	52,862,501	76,512,001	78,512,001	87,550,000	87,550,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	7,48	7,48	9,77	9,77	58,09	58,09	60,38	87,39	89,68	100	100
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	65,097,000	65,097,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	65,097,000	65,097,000	65,097,000	65,097,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Target Fisik			0	0	0	0	0	76,81	76,81	76,81	100	100	100	100
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	29,410,000	29,410,000	150	300	450	600	750	21,700,000	21,850,000	22,000,000	22,150,000	29,110,000	29,260,000	29,410,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0,51	1,02	1,53	2,04	2,55	73,78	74,29	74,8	75,31	98,98	99,49	100
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,582,900,300	1,582,900,300	39,745,000	188,964,000	268,609,100	347,354,100	419,499,100	671,555,300	756,675,300	1,015,870,300	1,080,615,300	1,331,640,300	1,562,900,300	1,582,900,300
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,582,900,300	1,582,900,300	39,745,000	188,964,000	268,609,100	347,354,100	419,499,100	671,555,300	756,675,300	1,015,870,300	1,080,615,300	1,331,640,300	1,562,900,300	1,582,900,300
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	839,225,300	839,225,300	39,745,000	95,989,000	129,184,100	150,429,100	190,174,100	327,490,300	412,610,300	669,805,300	689,550,300	825,225,300	839,225,300	839,225,300
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			4,74	11,44	14,65	17,18	22,66	39,02	49,17	79,81	82,16	98,33	100	100
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	725,945,000	725,945,000	0	92,975,000	139,025,000	191,025,000	216,025,000	326,335,000	326,335,000	328,335,000	373,335,000	488,685,000	705,945,000	725,945,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0,69	13,5	19,84	27	30,45	45,64	45,64	45,92	52,12	67,32	97,24	100

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara	17,730,000	17,730,000	0	0	400	5,900,000	13,300,000	17,730,000	17,730,000	17,730,000	17,730,000	17,730,000	17,730,000	17,730,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	2,26	33,28	75,01	100	100	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5,554,340,000	5,554,340,000	32,409,000	147,368,000	254,327,000	361,586,000	479,285,000	1,074,976,000	4,310,680,000	4,431,449,000	4,588,813,000	5,008,522,000	5,440,852,000	5,554,340,000
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	5,554,340,000	5,554,340,000	32,409,000	147,368,000	254,327,000	361,586,000	479,285,000	1,074,976,000	4,310,680,000	4,431,449,000	4,588,813,000	5,008,522,000	5,440,852,000	5,554,340,000

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2,377,330,000	2,377,330,000	32,409,000	139,368,000	246,327,000	353,286,000	470,985,000	1,051,161,000	1,197,120,000	1,310,439,000	1,467,803,000	1,861,047,000	2,263,842,000	2,377,330,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			1,55	6,05	10,55	15,05	20	44,41	50,55	55,31	61,07	78,28	95,23	100
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3,177,010,000	3,177,010,000	0	8,000,000	8,000,000	8,300,000	8,300,000	23,815,000	3,113,560,000	3,121,010,000	3,121,010,000	3,147,475,000	3,177,010,000	3,177,010,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0,25	0,25	0,26	0,26	0,75	98	98,24	98,24	99,07	100	100
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	664,176,000	664,176,000	4,800,000	15,300,000	61,300,000	70,300,000	75,000,000	229,943,000	233,943,000	250,243,000	283,243,000	557,318,000	639,348,000	664,176,000
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	664,176,000	664,176,000	4,800,000	15,300,000	61,300,000	70,300,000	75,000,000	229,943,000	233,943,000	250,243,000	283,243,000	557,318,000	639,348,000	664,176,000

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	169,800,000	169,800,000	0	6,500,000	38,500,000	43,500,000	44,200,000	52,200,000	52,200,000	55,500,000	84,500,000	124,500,000	169,800,000	169,800,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	3,83	22,67	25,62	26,03	30,74	30,74	32,69	49,76	73,32	100	100
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	494,376,000	494,376,000	4,800,000	8,800,000	22,800,000	26,800,000	30,800,000	177,743,000	181,743,000	194,743,000	198,743,000	432,818,000	469,548,000	494,376,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0,97	1,78	4,61	5,42	6,23	35,95	36,76	39,39	40,2	87,55	94,98	100
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	248,294,000	248,294,000	0	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	52,400,000	61,011,000	243,294,000	248,294,000
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	248,294,000	248,294,000	0	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	52,400,000	61,011,000	243,294,000	248,294,000
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	224,798,000	224,798,000	0	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	52,400,000	61,011,000	219,798,000	224,798,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Target Fisik			0	0	1,47	1,47	1,47	14,1	14,1	14,1	23,31	27,14	97,78	100
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	23,496,000	23,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,496,000	23,496,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,809,632,500	1,809,632,500	54,819,000	115,349,000	346,530,000	390,060,000	471,340,000	713,682,000	757,212,000	786,992,000	919,402,000	1,330,036,000	1,707,288,500	1,809,632,500
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	1,809,632,500	1,809,632,500	54,819,000	115,349,000	346,530,000	390,060,000	471,340,000	713,682,000	757,212,000	786,992,000	919,402,000	1,330,036,000	1,707,288,500	1,809,632,500
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	561,625,000	561,625,000	0	0	48,300,000	48,300,000	86,050,000	107,968,000	107,968,000	107,968,000	185,868,000	318,015,000	521,625,000	561,625,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	8,6	8,6	15,32	19,22	19,22	19,22	33,09	56,62	92,88	100

Uraian	Pagu DPA (Rp)	Pagu Paket (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15,144,419,993	15,144,419,992	546,751,340	1,288,318,901	2,184,918,762	2,830,166,693	3,524,903,954	5,422,101,613	9,169,758,874	9,979,106,135	10,846,377,496	12,683,616,791	14,482,179,198	15,144,419,992
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	885,431,500	885,431,500	49,819,000	105,349,000	183,879,000	227,409,000	270,939,000	464,743,000	508,273,000	538,053,000	581,583,000	739,445,000	823,087,500	885,431,500
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			5,77	12,04	20,91	25,83	30,74	52,63	57,55	60,77	65,69	83,52	92,96	100
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	10,000,000	10,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	352,576,000	352,576,000	0	0	104,351,000	104,351,000	104,351,000	130,971,000	130,971,000	130,971,000	141,951,000	262,576,000	352,576,000	352,576,000
Target Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Target Fisik			0	0	29,6	29,6	29,6	37,15	37,15	37,15	40,26	74,47	100	100

Sumber: JeGos Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 maupun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik direpresentasikan oleh capaian IKU sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan/ Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan 1 Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat						
1	Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka	6,4	14,49	-29,05	Tidak Tercapai
Sasaran 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik						
1	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	0,015	0,19	110	Tercapai
Sasaran 2 Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat						
1	Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam	%	100	100	100	Tercapai
Rata-rata Capaian					60,32	

Sumber: e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas adalah sebesar 60,32%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Melalui laporan ini, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah.

1. Tujuan

Yaitu: **Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat**

a. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatkan kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka	6,4	14,49	-29,05

Sumber: e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

Indikator kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ada 1 (satu) indikator yaitu:

1) Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam

Formulasi/ cara pengukuran dari indikator ini yaitu dengan rumus standar deviasi sebagai berikut: (akar kuadrat dari jumlah (angka konflik – rata-rata) dikuadratkan dibagi jumlah data). Sumber data diperoleh dari laporan data konflik Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas. Target tahun 2025 yaitu 6,4 dan realisasinya adalah 14,49 dengan tipe penghitungan progres negatif.

Jumlah potensi konflik Januari - Desember 2025 = 52

Jumlah data = 5 (tahun 2021-2025)

2021 : 21

2022 : 24

2023 : 17

2024 : 35

2025 : 52 Standar deviasi (2021-2025) = 14.49

Jadi capaian Standar deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam adalah -29,05%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase Penurunan Potensi Konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	%	5	4	80
Tahun 2023				
Persentase Penurunan Potensi Konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	%	5	4	80
Tahun 2024				
Persentase konflik yang terjadi	%	20	29	185,5
Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka	6,5	5,49	115,54
Tahun 2025				
Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka	6,4	14,49	-29,05

Sumber: e-monev Bappedalitbang

Capaian kinerja indikator tujuan Tahun 2025 tidak dapat dibuat perbandingan secara utuh dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator dan satuan indikator tidak lagi sama. Capaian kinerja Tahun 2025 untuk indikator Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam adalah -29,05% dari target angka 6,4 dan capaian angkanya 14,49. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu sebesar 5,49. Capaian angka standar deviasi ini belum mencapai target akhir Renstra Transisi 2024-2026 yaitu sebesar 6,3.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya Kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat. Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka	6,4	14,49	-29,05	6,3	200

Sumber : e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa target Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,4, namun realisasinya mencapai 14,49, atau -29,05% dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak potensi konflik dan keterjadian konflik yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata empat tahun sebelumnya di Kabupaten Banyumas. Adapun target Standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam pada akhir periode Renstra Tahun 2026 adalah 6,3, yang berarti kinerja saat ini sudah melampaui target akhir yang direncanakan, dengan persentase pencapaian Renstra hingga tahun 2025 sebesar 200%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional,
provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi Banyumas	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
Standart deviasi potensi konflik ipoleksosbudhankam	14,49	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.5, realisasi kinerja indikator **standar deviasi potensi konflik ipoleksosbudhankam** di Kabupaten Banyumas tahun 2025 tercatat sebesar **14,49**. Capaian tersebut menunjukkan hasil pengukuran variasi potensi konflik selama tahun berjalan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan deteksi dini terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan keamanan di daerah.

Sampai dengan akhir tahun 2025, **belum tersedia standar pembanding** baik pada tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, maupun kabupaten pembanding. Oleh karena itu, capaian kinerja ini disajikan sebagai **gambaran kondisi kinerja pada periode pelaporan**, tanpa dilakukan perbandingan antarwilayah maupun penetapan sebagai baseline, seiring dengan adanya penyesuaian indikator kinerja pada periode Rencana Strategis berikutnya.

e. Analisis penyebab kegagalan dalam pencapaian target

Kegagalan pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kinerja. Berikut adalah faktor utama yang berperan dalam kegagalan dalam pencapaian target indikator tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas:

1) Faktor Organisasi dan Tata Kelola

Perencanaan target indikator belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika kondisi objektif di lapangan, khususnya meningkatnya kompleksitas isu sosial, politik, dan keamanan selama tahun berjalan. Selain itu, mekanisme pengendalian dan evaluasi internal terhadap potensi konflik belum

dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan, sehingga respons kebijakan cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif.

2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM yang secara khusus menangani analisis potensi konflik berdampak pada belum optimalnya proses pemetaan, analisis tren, dan mitigasi dini. Beban kerja yang tinggi serta keterbatasan peningkatan kapasitas teknis SDM turut memengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam merespons dinamika potensi konflik yang berkembang.

3) Faktor Kolaborasi dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Lain

Koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait kewaspadaan dini belum berjalan secara optimal dan terstruktur. Perbedaan prioritas program serta keterbatasan integrasi data dan informasi antar perangkat daerah menyebabkan upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik belum sepenuhnya sinergis dan terpadu.

4) Faktor Teknologi dan Digitalisasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dalam pengumpulan, pengolahan, serta analisis data potensi konflik masih terbatas. Belum tersedianya sistem peringatan dini berbasis data terintegrasi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi peningkatan potensi konflik, sehingga berdampak pada kurang optimalnya upaya pengendalian variasi potensi konflik sesuai target yang ditetapkan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1) Mengoptimalkan penggunaan SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan

pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan *refocussing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1.947.395.300	1.582.900.300	364.495.000
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	6.100.147.000	5.554.340.000	545.807.000
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	751.891.000	664.176.000	87.715.000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	132.538.000	248.294.000	115.756.000

No.	Program	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.730.000.000	1.809.632.500	79.632.500
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.255.538.756	5.285.077.193	29.538.437

Sumber : DPA Induk 2025 & DPA Perubahan 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan meningkatnya akuntabilitas instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

Tabel 3.6
Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Keuangan

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	100	94,90
2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing	100	97,18

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
3.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	100	98,67
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas	100	94,79
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	100	98,53
6.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100	99,44

Sumber : e-Monev & SIPD Penatausahaan Tahun 2025

Secara umum, capaian kinerja program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi kinerja seluruh program mencapai 100%, sementara realisasi keuangan berada pada kisaran 94,90%–99,44%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan optimal dan realisasi kinerja lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan, yang mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan capaian kinerja, berikut uraian masing-masing program:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 94,90%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja

program dapat dicapai dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.

Sasaran program ini adalah optimalnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah. Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dengan lebih dari 30 (tiga puluh) subkegiatan, yang meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Administrasi umum perangkat daerah;
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah serta pemeliharaan barang milik daerah.

Subkegiatan dalam program ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyediaan bahan logistik dan perlengkapan perkantoran, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penyediaan jasa komunikasi dan pelayanan umum kantor, serta pemeliharaan kendaraan dinas, gedung, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Capaian kinerja program ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97,18%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dapat berjalan efektif dan efisien.

Sasaran program adalah meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan sejumlah subkegiatan, yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kewaspadaan nasional.

Subkegiatan meliputi deteksi dini potensi konflik sosial, fasilitasi kelembagaan kewaspadaan daerah, pemantauan orang asing dan lembaga asing, koordinasi intelijen daerah, serta penyusunan laporan pelaksanaan kewaspadaan nasional.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencapai 100% capaian kinerja dengan realisasi keuangan sebesar 98,67%.

Sasaran program ini adalah meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan beberapa subkegiatan, meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba; serta
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

Subkegiatan mencakup pembinaan dan fasilitasi ketahanan sosial budaya masyarakat, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta koordinasi lintas sektor dalam penguatan ketahanan wilayah.

4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Capaian kinerja Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 94,79%.

Sasaran program adalah meningkatnya peran serta, ketaatan, dan tertib administrasi organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) subkegiatan, meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; serta
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang organisasi kemasyarakatan.

Subkegiatan mencakup pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing, serta penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi.

- 5) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini mencapai 100% capaian kinerja dengan realisasi keuangan sebesar 98,53%.

Sasaran program adalah meningkatnya partisipasi dan pemahaman politik masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) subkegiatan, meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pendidikan politik dan etika budaya politik;
2. Pelaksanaan kebijakan pendidikan politik dan fasilitasi kelembagaan politik; serta
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik dan

pemantauan situasi politik.

Subkegiatan meliputi sarasehan dan sosialisasi pendidikan politik, pemantauan situasi politik daerah, fasilitasi bantuan keuangan partai politik, serta koordinasi dengan partai politik dan pemangku kepentingan terkait.

6) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mencapai 100% capaian kinerja dengan realisasi keuangan sebesar 99,44%.

Sasaran program ini adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) subkegiatan, meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, dan karakter bangsa; serta
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

2. Sasaran

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja *sasaran (Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik & Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam)* Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun
2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	0,015	0,19	1.266,67
2	Persentase penyelesaian konflik Ipoleksosbudh ankam	%	97,1	100	100

Sumber: e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun
2025 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2024					
1	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	0,015	1,44	9.573,33
2	Persentase penyelesaian konflik Ipoleksosbudh ankam	%	80	97,1	121,37
Tahun 2025					
1	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	0,015	0,19	1.266,67

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Persentase penyelesaian konflik Ipoeksosbudh ankam	%	97,1	100	100

Sumber: e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja untuk indikator sasaran melebihi 100%. Capaian kinerja untuk indikator Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1.266,67% dari target 0,015% dan capaian 0,19%. Nilai ini mengalami penurunan dari Tahun 2024 yaitu 1,44%. Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik telah melampaui target kinerja Renstra yaitu 0,045%. Capaian kinerja untuk Persentase penyelesaian konflik Ipoeksosbudhankam tahun 2025, capaiannya sebesar 100% dari target 97,1%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal dibandingkan dengan perencanaan awal. Meskipun demikian, masih perlu ada evaluasi karena capaian target jauh di atas 100% yang menunjukkan kurang matangnya tahapan perencanaan.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja Tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	%	75	78	104

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase wilayah kecamatan yang kondisinya aman	%	75	100	133
Tahun 2023				
Persentase wilayah kecamatan yang kondisinya aman	%	80	100	125
Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	%	75	78,72	104,96
Tahun 2024				
Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	0,015	1,44	9.573,33
Persentase penyelesaian konflik Ipoleksosbudhankam	%	80	97,1	121,37
Tahun 2025				
Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	0,015	0,19	1.266,67
Persentase penyelesaian konflik Ipoleksosbudhankam	%	97,1	100	100

Sumber : e-monev Bappedalitbang

Indikator kinerja sasaran pada Tahun 2025 pada prinsipnya sama dengan Tahun 2024, namun berbeda dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023, seiring dengan adanya penyesuaian indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian sasaran. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih dapat dibandingkan secara langsung antar tahun, khususnya indikator yang bersifat berkelanjutan. Salah satu indikator yang dapat dibandingkan adalah Persentase Wilayah Kecamatan yang Kondisinya Aman. Pada Tahun 2022, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 75%, dengan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 133%. Pada Tahun 2023, target indikator meningkat menjadi 80%, dengan realisasi tetap 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 125%. Selanjutnya pada Tahun 2024, target indikator tetap sebesar 80%, dengan realisasi

97,1%, sehingga capaian kinerja mencapai 121,37%. Pada Tahun 2025, target indikator disesuaikan menjadi 97,1%, dan realisasinya mencapai 100%, sehingga capaian kinerja berada pada angka 100%, yang menunjukkan target telah tercapai secara optimal.

Indikator lain yang juga dapat dibandingkan adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Politik. Pada Tahun 2022, target indikator ini ditetapkan sebesar 75%, dengan realisasi 78%, sehingga capaian kinerja mencapai 104%. Pada Tahun 2023, target tetap sebesar 75%, dengan realisasi meningkat menjadi 78,72%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 104,96%. Indikator ini tidak lagi digunakan pada Tahun 2024 dan 2025, seiring dengan perubahan fokus pengukuran kinerja. Sementara itu, mulai Tahun 2024 hingga Tahun 2025 digunakan indikator baru yaitu Cakupan Pemilih yang Memperoleh Pendidikan Politik. Pada Tahun 2024, target indikator ini ditetapkan sebesar 0,015%, dengan realisasi mencapai 1,44%, sehingga capaian kinerja sangat tinggi yaitu 9.573,33%. Pada Tahun 2025, target indikator tetap 0,015%, namun realisasi sebesar 0,19%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 1.266,67%. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kegiatan pendidikan politik jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Selain itu, indikator Persentase Penyelesaian Konflik Ipoleksosbudhankam juga digunakan pada Tahun 2024 dan 2025. Pada Tahun 2024, target indikator sebesar 80%, dengan realisasi 97,1%, sehingga capaian kinerja mencapai 121,37%. Pada Tahun 2025, target indikator disesuaikan menjadi 97,1%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh target penyelesaian konflik telah tercapai. Secara keseluruhan, capaian kinerja indikator pada periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan konsisten, dengan sebagian besar indikator mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, meskipun terdapat perubahan indikator kinerja seiring dengan penyesuaian kebijakan dan fokus pembangunan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran (*Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik & Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam*) Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025
dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	% Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	0,015	0,19	1.266,67	0,045	422,22
Persentase penyelesaian konflik Ipoleksosbudhankam	%	97,1	100	100	80	125

Sumber : e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

Capaian kinerja untuk indikator sasaran Cakupan Pemilih yang Memperoleh Pendidikan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut: Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,015%, dengan realisasi mencapai 0,19%, atau setara dengan 1.266,67% dari target Tahun 2025. Target akhir Renstra Tahun 2026 untuk indikator ini adalah 0,045%, sehingga capaian kinerja hingga

Tahun 2025 telah mencapai 422,22% dari target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik kepada pemilih telah melampaui target yang direncanakan dalam Renstra Tahun 2026. Dengan capaian tersebut, indikator ini dapat dikategorikan sangat berhasil, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Penyelesaian Konflik Ipoleksosbudhankam adalah sebagai berikut: Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 97,1%, dengan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100% dari target Tahun 2025. Target akhir Renstra untuk indikator ini adalah 80%, sehingga capaian kinerja hingga Tahun 2025 telah mencapai 125% dari target akhir Renstra. Artinya, target penyelesaian konflik yang ditetapkan dalam Renstra telah terlampaui pada Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik serta efektivitas upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan konflik yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	0,19%	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
Persentase penyelesaian konflik Ipoleksosbudhankam	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

- e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja indikator sasaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal. Berikut adalah faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja:

1. Faktor Internal

a) Komitmen pimpinan dan aparatur

Komitmen pimpinan dan aparatur dalam penguatan pendidikan politik serta penanganan konflik mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan konsisten.

b) Kebijakan dan strategi yang efektif

Strategi pelaksanaan pendidikan politik dan penanganan konflik disusun sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

c) SDM yang kompeten

SDM yang memahami dinamika politik dan sosial mampu melaksanakan edukasi politik serta penanganan konflik secara tepat.

d) Dukungan sistem dan teknologi

Pemanfaatan sistem pelaporan dan pendataan mendukung pemantauan kegiatan pendidikan politik dan penyelesaian konflik.

e) Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi berkala memastikan kegiatan pendidikan politik dan penanganan konflik berjalan sesuai target.

3. Faktor Eksternal

a) Dukungan pemerintah pusat dan regulasi

Kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat mendukung pelaksanaan pendidikan politik dan penanganan konflik daerah.

- b) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
Kondisi sosial dan politik yang relatif kondusif mendukung efektivitas pendidikan politik dan penyelesaian konflik.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut

:

Tabel 3.11
Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1.947.395.300	1.582.900.300	364.495.000
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	6.100.147.000	5.554.340.000	545.807.000
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	751.891.000	664.176.000	87.715.000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	132.538.000	248.294.000	115.756.000
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.730.000.000	1.809.632.500	79.632.500
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.255.538.756	5.285.077.193	29.538.437

Sumber : SIPD RI Tahun 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain :

Tabel 3.12
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran

No	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	100%	98,53%
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	99,44%
3.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	100%	98,67%
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas	100%	94,79%
3.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing	100%	97,18%

Sumber : e-monev Bappedalitbang & SIPD Penatausahaan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran

meliputi:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan 98,53%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran karena realisasi kinerja lebih besar dari realisasi keuangan.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan 99,44%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran karena realisasi kinerja lebih besar dari realisasi keuangan.
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan 97,18%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran karena realisasi kinerja lebih besar dari realisasi keuangan.

C. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dianggarkan dalam APBD Tahun 2025. Total Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah 15.144.419.993,00 dengan realisasi sebesar 14.695.512.351,00 (97,04%). Secara rinci anggaran dan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realiasi Fisik (%)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15.144.419.993	15.144.419.992	100	14.560.087.495	96,14	100	97,23
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5.285.077.193	5.285.077.192	100	5.015.346.799	94,9	100	95,18
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.049.600	131.049.600	100	128.623.920	98,15	100	98,27
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.349.600	32.349.600	100	31.670.000	97,9	100	99,85
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.700.000	98.700.000	100	96.953.920	98,23	100	97,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.971.607.316	3.971.607.315	100	3.728.724.472	93,88	100	95,33
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	3.912.027.316	3.912.027.315	100	3.672.744.472	93,88	100	95,35
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	59.580.000	59.580.000	100	55.980.000	93,96	100	93,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.582.464	453.582.464	100	450.375.795	99,29	100	89,85
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	13.176.300	13.176.300	100	13.176.000	100	100	85,54
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	84.502.728	84.502.728	100	83.406.175	98,7	100	98,68
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.226.170	7.226.170	100	7.204.170	99,7	100	99,74
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.125.000	139.125.000	100	137.326.035	98,71	100	99,17
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.774.587	22.774.587	100	22.528.335	98,92	100	98,92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	186.047.400	186.047.400	100	186.035.080	99,99	100	77,64

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realiasi Fisik (%)
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	730.279	730.279	100	700.000	95,85	100	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.655.000	29.655.000	100	29.635.280	99,93	100	100
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	500.000	500.000	100	500.000	100	100	100
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	29.155.000	29.155.000	100	29.135.280	99,93	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.125.813	517.125.813	100	500.963.614	96,87	100	96,87
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	99.527.512	99.527.512	100	89.520.163	89,95	100	89,94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.598.301	417.598.301	100	411.443.451	98,53	100	98,52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.057.000	182.057.000	100	177.023.718	97,24	100	97,25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	87.550.000	87.550.000	100	83.128.464	94,95	100	94,95
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	65.097.000	65.097.000	100	64.575.285	99,2	100	99,2
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	29.410.000	29.410.000	100	29.319.969	99,69	100	99,76

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realiasi Fisik (%)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.582.900.300	1.582.900.300	100	1.569.968.385	99,18	100	99,51
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.582.900.300	1.582.900.300	100	1.569.968.385	99,18	100	99,51
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	839.225.300	839.225.300	100	836.348.385	99,66	100	99,73
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	725.945.000	725.945.000	100	716.145.000	98,65	100	99,27
Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara	17.730.000	17.730.000	100	17.475.000	98,56	100	98,56
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.554.340.000	5.554.340.000	100	5.474.701.700	98,57	100	99,15

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realiasi Fisik (%)
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	5.554.340.000	5.554.340.000	100	5.474.701.700	98,57	100	99,15
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.377.330.000	2.377.330.000	100	2.308.943.090	97,12	100	98,49
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3.177.010.000	3.177.010.000	100	3.165.758.610	99,65	100	99,65
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	664.176.000	664.176.000	100	629.580.166	94,79	100	96,71

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realiasi Fisik (%)
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	664.176.000	664.176.000	100	629.580.166	94,79	100	96,71
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	169.800.000	169.800.000	100	156.309.916	92,06	100	99,56
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	494.376.000	494.376.000	100	473.270.250	95,73	100	95,73
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	248.294.000	248.294.000	100	117.534.955	47,34	100	72,67
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	248.294.000	248.294.000	100	117.534.955	47,34	100	72,67
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	224.798.000	224.798.000	100	117.534.955	52,28	100	69,82

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realiasi Fisik (%)
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	23.496.000	23.496.000	100	0	0	100	100
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.809.632.500	1.809.632.500	100	1.752.955.490	96,87	100	98,89
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	1.809.632.500	1.809.632.500	100	1.752.955.490	96,87	100	98,89
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	561.625.000	561.625.000	100	548.227.500	97,61	100	99,48
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	885.431.500	885.431.500	100	866.171.530	97,82	100	99,43

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realiasi Fisik (%)
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	100	100	100
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	352.576.000	352.576.000	100	328.556.460	93,19	100	96,53

Sumber: JeGos Tahun 2025

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran yang mendukung pencapaian target indikator kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 berasal dari pagu anggaran pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang totalnya sebesar Rp 1.809.632.500,00. Adapun pagu terkait dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran pada Tahun 2025 adalah berasal dari 3 program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total anggaran Rp 8.946.872.800,00.

1. Efektifitas Anggaran

Efektivitas anggaran adalah tingkat keberhasilan penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Anggaran dikatakan efektif jika alokasi dan realisasi anggaran menghasilkan output dan outcome sesuai dengan yang direncanakan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat atau organisasi. Dalam implementasi reformasi birokrasi dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), efektivitas anggaran sangat berkaitan dengan bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kriteria tingkat efektifitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

- a. Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Tingkat Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian
Tujuan/ Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata – rata Capaian kinerja	Realisasi Anggaran		Tingkat Efektivitas
				(Rp)	%	
1	Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat	1	-41,5%	14.695.512.351,00	97,04	Efektif
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik	1	1.266,67%	5.472.951.700	98,53	Efektif
3.	Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat	1	100%	4.207.219.844	97,52	Efektif

Sumber: e-monev dan SIPD Penatausahaan Tahun 2025

Dari tabel 3.14 dapat dilihat bahwa indikator Meningkatkan kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat memiliki realisasi anggaran sebesar Rp 14.695.512.351,00 dengan efektivitas anggaran 97,04%. Untuk indikator Sasaran Meningkatkan kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki realisasi anggaran Rp5.472.951.700,00, dengan efektivitas anggaran 98,53%. Kemudian untuk indikator Sasaran Meningkatkan upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat memiliki realisasi anggaran Rp4.207.2919.844 dengan efektivitas anggaran 97,52%. Untuk capaian indikator tujuan dan sasaran dinilai efektif dalam penggunaan anggaran, karena tingkat realisasi belanja mendekati total anggaran yang dialokasikan, menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah digunakan sesuai dengan rencana kegiatan.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran adalah ukuran sejauh mana penggunaan anggaran dilakukan dengan cara yang paling hemat dan optimal dalam menghasilkan output tanpa mengurangi kualitas atau tujuan yang

telah ditetapkan. Anggaran dikatakan efisien jika sumber daya yang tersedia digunakan seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks pemerintahan dan reformasi birokrasi, efisiensi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Hal ini juga terkait dengan peningkatan nilai SAKIP dalam menilai keterkaitan antara anggaran dengan kinerja yang dicapai. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 15
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata – rata Capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
				(Rp)	%	
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik	1	1.266,67%	5.472.951.700	98,53	Efisien
2	Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat	1	100%	4.207.219.844	97,52	Efisien

Sumber: e-monev Bappedalitbang Tahun 2025

Efisiensi anggaran dapat diukur dengan perbandingan antara output (capaian kinerja) dan input (realisasi anggaran). Jika capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran, maka anggaran dapat dikatakan efisien. Pada indikator sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik dengan menggunakan 98,53% dari anggaran yang direncanakan, instansi berhasil mencapai target kinerja, artinya tanpa menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan, instansi tetap dapat melampaui target kinerja. Ini menunjukkan adanya efisiensi, karena dengan sumber daya yang lebih sedikit (anggaran yang tidak 100% terserap), kinerja tetap optimal bahkan melampaui target. Sementara untuk indikator sasaran Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian kinerja

100% dan anggaran yang terserap 91,72 % dapat dikatakan efisien karena dengan hanya menggunakan 91,72% dari anggaran, tetapi berhasil mencapai 100% dari target kinerja. Artinya, instansi bisa menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari yang direncanakan dengan anggaran yang lebih rendah dari total alokasi. Hal ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik, karena dengan input yang lebih kecil, output yang dihasilkan justru jauh lebih besar.

3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas. Tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 89 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp1.099.453.981,00. Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing dan pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 82 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 985.053.981,00, realisasi pengadaan sebesar Rp955.089.652,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp29.964.329,00 atau 3,05%.

E. PRESTASI dan PENGHARGAAN

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memperoleh penghargaan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 di mana ada 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatnya kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat. Rata-rata capaian kinerja indikator tujuan ini adalah -41,5% dengan rincian Standar deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam dari target 6, terealisasi 14,49 atau tidak tercapai.

Rata-rata capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran lebih dari 100%. Capaian cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik adalah 1.266,67% dari Target 0,015% dan realisasi 1,44%. Capaian kinerja untuk indikator Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam adalah sebesar 100% dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat mencapai tujuan, akan tetapi telah melampaui target yang ditetapkan di indikator sasaran, yang mencerminkan kurang sinkronnya indikator tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Progres penyelesaian isu strategis terkait di Kabupaten Banyumas pada umumnya dan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada khususnya belum menunjukkan capaian yang baik dengan rata-rata capaian indikator kinerja di atas 100%. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi agar kinerja dapat terus ditingkatkan. Dengan langkah strategis yang tepat, diharapkan capaian indikator kinerja di masa mendatang dapat semakin optimal dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan kolaboratif. Berikut langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja agar lebih selaras dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan;
3. Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dengan pemangku kepentingan terkait;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efektivitas, akurasi data, dan kecepatan pelaporan kinerja;
5. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perbaikan kinerja secara berkesinambungan.